ANGGARAN DASAR (AD) SHODAQOH SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 1: Nama dan Kedudukan

- 1. Organisasi ini bernama Shodaqoh Sosial Masyarakat
- 2. Berkedudukan di Kel. Tengah Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. bogor.

Pasal 2: Dasar dan Asas

- 1. Berlandaskan pada prinsip keikhlasan, amanah, dan profesionalitas.
- 2. Bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui penyaluran dana shodagoh sosial

Pasal 3: Tujuan

- 1. Mengumpulkan dana shodaqoh dari masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- 2. Menyalurkan dana tersebut kepada yang sangat membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kebajikan.

Pasal 4: Kegiatan

- 1. Mengadakan kampanye dan program pengumpulan dana shodaqoh.
- 2. Menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria.
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Pasal 5: Keanggotaan

- 1. Keanggotaan terbuka untuk semua masyarakat yang memiliki kepedulian sosial.
- 2. Anggota berhak mengusulkan program dan ikut serta dalam kegiatan organisasi.

Pasal 6: Kepengurusan

- 1. Struktur organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan divisi-divisi yang lain jika diperlulkan yang didasarkan atas kesanggupan.
- 2. Masa jabatan pengurus adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 7: Pembubaran

- 1. Organisasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota dengan alasan yang jelas.
- 2. Dalam hal pembubaran, aset organisasi akan disalurkan kepada lembaga sosial lainnya yang memiliki tujuan serupa.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) SHODAQOH SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 1: Keanggotaan

- 1. Pendaftaran anggota dilakukan secara sukarela.
- 2. Setiap anggota wajib mematuhi AD/ART organisasi dan mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan.
- 3. Anggota yang melanggar aturan atau merugikan organisasi dapat diberhentikan setelah melalui proses evaluasi.

Pasal 2: Rapat dan Keputusan

- Rapat Umum Anggota diadakan minimal sekali dalam setahun untuk membahas laporan kegiatan, keuangan, dan rencana kerja.
- 2. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara dengan mayoritas.

Pasal 3: Pengelolaan Dana

- 1. Dana yang diterima dari masyarakat harus dikelola dengan transparan dan dilaporkan secara berkala kepada anggota dan donatur.
- 2. Laporan keuangan harus diaudit oleh pihak independen setiap tahun.

Pasal 4: Program Kerja

- 1. Setiap divisi dalam organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah direncanakan.
- 2. Program kerja disusun berdasarkan hasil rapat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Pasal 5: Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

- 1. Anggota atau pengurus yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing, atau pemberhentian.
- 2. Sengketa yang terjadi di dalam organisasi diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.